

# **PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DAN KAITANNYA DENGAN TINGKAT KEMISKINAN**

**SUPADI DAN ACHMAD ROZANY NURMANAF**  
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor

## **ABSTRACT**

Study conducted in 3 province, these are Central Java, Lampung and South Sulawesi. In each province choice 4 villages classified by agroecosystem, i.e wet land villages and dry land villages. In every village interviewed 50-60 households as the Patanas household sample. The purpose of the study is to inform household income, especially per capita income and expenditure that relate to poverty level. This is based on Sayogyo, World Bank and BPS criteria, beside structure and distribution of household income. The result of study showed that according to Sayogyo and BPS criteria household in both agroecosystem, wet land and dry land, are not fall into poverty criteria. But, by using the World Bank criteria the household of the village falls into poverty criteria. While, income structure is still dominated by agricultural sector, but the roll of non-agricultural sector increate gradually. Household income distribution falls in highly inequality classification.

*Key words: Household Income, Expenditure, Poverty, Income Distribution.*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekomomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebituhan hidup pokoknya.

Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan (Suhardjo, 1997).

Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka persoalan pendapatan per kapita dari distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapat perhatian terutama untuk melihat tingkat pendapatan dan pembagian pendapatan di antara warga masyarakatnya yaitu siapa mendapat berapa dan siapa yang beruntung. Aspek ini semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Berbicara perihal kemiskinan, maka secara implisit

langsung maupun tidak langsung telah membicarakan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk.

Dalam pembangunan nasional Indonesia, masalah kemiskinan di pedesaan merupakan isu utama. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, padahal sebelum terjadinya krisis tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang. Sebelum krisis ekonomi (tahun 1996) jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 juta jiwa. Akibat krisis ekonomi yang berkelanjutan, sampai dengan akhir 1998, jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa (24,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun seiring dengan membaiknya ekonomi jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 38,4 juta jiwa dan diantaranya sekitar 65,36 persen tinggal di pedesaan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin tercatat 37,3 juta (17,4 persen). Dibanding tahun 2002 jumlah tersebut menurun sekitar 2,86 persen (BPS, 2003).

Menurut Suhardjo (1997) dari segi penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena keadaan alamnya yang miskin atau langka sumberdaya alam, sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah, sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena alokasi sumberdaya yang ada tidak terbagi secara merata, meskipun sebenarnya jika total produksi yang dihasilkan dapat dibagi secara merata tidak akan terjadi kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan di pedesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem setempat (Sarasutha dan Noor, 1994). Wilayah berproduktivitas rendah mempunyai hubungan timbal balik dengan kemiskinan, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Oleh karena itu, suatu wilayah yang tingkat produktivitasnya rendah dapat mengakibatkan masyarakatnya miskin. Demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat mengelola sumberdaya mengakibatkan wilayah itu miskin.

Struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan bervariasi tergantung pada keragaman sumberdaya pertanian. Menurut Rachman dan Hadimuslihat (1989) dan Adnyana et. al. (2000) keragaman sumberdaya mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Sumber pendapatan rumah tangga di suatu lokasi erat kaitannya

dengan agroekosistem lokasi tersebut. Secara umum agroekosistem pedesaan dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi yaitu lahan basah (sawah) dan lahan kering.

Pendapatan rumah tangga pedesaan sangat bervariasi. Variasi itu tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. Aksesibilitas ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan faktor dominan terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di sektor nonpertanian.

Secara teoritis kemiskinan di pedesaan dapat dikurangi bila kesempatan kerja di sektor nonpertanian terbuka. Namun kenyataan tidak demikian karena di pedesaan menghadapi persoalan aksesibilitas sehingga kesempatan bekerja di sektor nonpertanian sangat terbatas. Sementara daya dukung lahan pertanian tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh kurangnya kesempatan dalam kegiatan produktif karena terkait dengan tidak dimilikinya aset fisik, modal, keterampilan dan tidak adanya aksesibilitas terhadap pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Banyaknya penduduk miskin merupakan cerminan ketimpangan distribusi pendapatan dan aset yang makin buruk di antara rakyat banyak selama masa pembangunan. Hal ini secara langsung mempengaruhi ketidakmerataan kesempatan kerja yang produktif.

Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi mengenai pendapatan rumah tangga pedesaan (struktur pendapatan, pendapatan per kapita, distribusi pendapatan) dan menganalisis tingkat pendapatan dan tingkat pengeluaran rumah tangga berdasarkan agroekosistem dan kaitannya dengan tingkat kemiskinan.

## **METODOLOGI**

### **Pendekatan dan Lingkup Penelitian**

Secara konseptual kemiskinan dapat dibedakan atas tiga pengertian yaitu kemiskinan subjektif, kemiskinan absolut/mutlak dan kemiskinan relatif (Sarasutha dan Noor, 1994). Pada konsep kemiskinan subjektif, setiap orang mendasarkan

pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut ataupun relatif sebenarnya tidak tergolong miskin. Dengan kata lain individu melakukan perbandingan antara "needs dan wants". Pengertian kemiskinan absolut adalah seseorang (keluarga) yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk memelihara kondisi fisiknya secara efisien. Sedangkan konsep kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep *relative deprivation* atau posisi seseorang relatif terhadap anggota masyarakat lain sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Konsep ini berkaitan erat dengan ketimpangan pendapatan.

Masalah kemiskinan sebenarnya telah banyak didiskusikan oleh para pakar dari berbagai sudut pandang, misalnya Sen (1981) melihat kemiskinan dari sudut pandang biologis atau kebutuhan dasar (*basic need*), Scott (1979) melihatnya dari pendapatan rata-rata per kapita (*income per capita*), dan Friedman (1979) melihatnya dari segi kesempatan untuk mengaktualisasikan basis kekuatan sosial. (Crescent, 2002)

Untuk kepentingan program pengentasan kemiskinan dan penentuan masyarakat yang miskin dibentuk pula konsep pengukuran kemiskinan. Sajogyo (1978) mengukur batas kemiskinan dari tingkat penghasilan/pengeluaran rumah tangga setara beras per kapita per tahun yaitu dibuat 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa. Sementara Sajogyo (1982) dalam Suhardjo, 1997 melakukan stratifikasi kemiskinan dengan membagi golongan penduduk menjadi tiga strata yaitu paling miskin, miskin sekali dan miskin. Sementara untuk golongan tidak miskin dibedakan lagi menjadi dua strata yaitu golongan cukup dan kaya. Pembagian strata kemiskinan dimaksudkan agar dapat diketahui berat ringannya situasi kemiskinan, serta untuk mengetahui kemajuan yang dicapai dalam mengatasi masalah kemiskinan dari waktu ke waktu.

Termasuk strata penduduk paling miskin adalah yang pendapatannya setara beras kurang dari 240 kg beras/kapita/tahun, miskin sekali 240-360 kg beras/kapita/tahun dan kelompok miskin 360-480 kg beras/kapita/tahun. Sementara kelompok kaya adalah mereka yang memiliki pendapatan sama atau lebih besar dari 960 kg/beras/kapita/tahun, sedangkan kelompok cukup antara 480 – 960 kg beras/kapita/tahun. Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1 per hari per kapita. Batas garis kemiskinan Bank Dunia adalah pendapatan per kapita per hari US \$ 1. Sedangkan garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan

untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan. Untuk tahun 2002, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp. 130.499/kapita/bulan (di perkotaan) dan Rp 96.512 (di pedesaan). Sedang untuk tahun 2003 sebesar Rp 138.803 (di perkotaan) dan Rp 105.888/kapita/bulan (di pedesaan). Selama periode 1999-2002 garis kemiskinan meningkat 41,22 persen di daerah perkotaan dan 29,94 persen di daerah pedesaan. Dengan demikian ukuran atau tingkat kemiskinan akan didekati dengan melihat besarnya tingkat pendapatan dan konsumsi pengeluaran rumah tangga per kapita. Tingkat pendapatan per kapita selanjutnya akan disetarakan dengan beras dan dollar Amerika (US \$). Tingkat pengeluaran per kapita per bulan diukur dalam besaran rupiah dan selanjutnya dengan menggunakan kriteria BPS ditetapkan tingkat/garis kemiskinan yang setiap tahun besarnya disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi dan harga barang-barang. Dalam penelitian ini penetapan garis kemiskinan menggunakan angka pengeluaran per kapita per bulan tahun 2003.

Tingkat kemiskinan suatu masyarakat erat hubungannya dengan ketimpangan distribusi pendapatan (Darwis dan Nurmanaf, 2001). Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang menjadikan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan sebagai prioritas penting dalam pembangunan merupakan hal yang sangat positif.

Dalam kaitannya dengan penilaian terhadap keberhasilan pembangunan (Seer, 1969 dalam Suhardjo, 1997) mengajukan tiga buah kriteria. Ketiga kriteria tersebut menyoroti masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan. Untuk menilai keberhasilan pembangunan ketiga kriteria tersebut harus dilihat secara bersama-sama. Jika salah satu saja dari ketiga kriteria tersebut gagal mencapai perbaikan, jangan dikatakan bahwa pembangunan itu berhasil meskipun pendapatan per kapita naik dua atau tiga kali lipat.

Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah merupakan salah satu indikator bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Namun demikian tingginya pendapatan per kapita tidak menjamin bahwa seluruh penduduk telah menikmati kemakmuran. Angka-angka pendapatan per kapita tidak menunjukkan bagaimana seluruh pendapatan tersebut dibagikan. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita belum diketahui apakah keadaan sebagian besar penduduk yang berpenghasilan rendah telah membaik atau belum. Pendapatan per kapita hanya merupakan gambaran secara umum dari kesejahteraan penduduk. Dengan demikian mengatasi maka keberhasilan

pembangunan tidak hanya diukur dari pendapatan per kapita tapi perlu juga dilihat dari distribusi pendapatan di antara para penduduknya. Dengan demikian mengatasi persoalan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam pembangunan.

Ada sejumlah cara untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Namun yang lazim dipakai ada dua yakni dengan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Cara pengukuran distribusi pendapatan dengan Indeks Gini berupa angka yang besarnya terletak di antara nol dan satu. Makin mendekati nol berarti makin baik distribusinya, sebaliknya makin mendekati satu, distribusi pendapatan makin buruk atau timpang. Untuk memberikan penilaian tinggi rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut (a) Indeks Gini kurang dari 0,4 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang rendah; (b) Indeks Gini antara 0,4- 0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan sedang; (c) Indeks Gini lebih besar atau sama dengan 0,5 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi (Oshima, 1976). Sedangkan Bank Dunia mengukur distribusi pendapatan dengan cara menyoroti secara khusus proporsi pendapatan yang diperoleh golongan penduduk dari kelompok pendapatan 40 persen terbawah. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dipergunakan justifikasi sebagai berikut. (a) Bila 40 persen terbawah dari kelompok populasi menerima bagian lebih dari 17 persen berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah; (b) Bila 40 persen terbawah dari kelompok populasi menerima bagian antara 12-17 persen berarti ketimpangan distribusi pendapatan sedang, dan (c) Bila 40 persen terbawah dari kelompok populasi menerima bagian kurang dari 12 persen berarti ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.

### **Lokasi Penelitian dan Responden**

Dalam penelitian ini dipilih tiga provinsi yang merupakan lokasi penelitian Patanas (Panel Petani Nasional) yaitu Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Selatan. Di setiap provinsi secara sengaja ditetapkan 4 desa sampel dengan agroekosistem yang berbeda dan berbasis komoditas dominan. Di setiap desa diwawancara sebanyak 50 – 60 responden yang juga merupakan rumah tangga sampel Patanas. Secara rinci karakteristik lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Provinsi		Kabupaten	Desa	Agroekosistem dominan
1.	Jawa Tengah	Klaten Boyolali Banjarnegara Pati	Karangwungu Cepogo Karangtengah Mojoagung	Sawah Lahan kering Lahan kering Lahan kering
2.	Lampung	Lampung Tengah Lampung Tengah Tanggamus Lampung Utara	Sumber Rejo Komerling Putih Air Naningan Kota Napal	Sawah Lahan kering Lahan kering Lahan kering
3.	Sulawesi Selatan	Sidrap Enrekang Bone Jeneponto	Passeno Baroko Selli Rumbia	Sawah Lahan kering Sawah Lahan kering

### Jenis dan Analisis Data

Data yang dipergunakan terutama berasal dari data primer yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan responden secara individual dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur. Secara umum analisis data menggunakan metoda deskriptif. Penggunaan hitungan-hitungan dilakukan untuk menghitung nilai rata-rata, persentase dan lain-lain. Untuk mengukur tingkat kemiskinan digunakan kriteria dari Sayogyo, Bank Dunia dan BPS. Sedangkan untuk pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan digunakan kriteria Bank Dunia dan Indeks Gini (Szal & Robinson, 1977).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mata Pencaharian Anggota Rumah Tangga

Secara agregat sumber mata pencaharian yang dominan adalah di sektor pertanian (di agroekosistem lahan sawah 70,8 persen dan agroekosistem lahan kering 74,3 persen) dibanding sektor nonpertanian 25,7 dan 29,2 persen (Tabel 1). Hal ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi sektor andalan bagi rumah tangga di pedesaan. Akan tetapi masing-masing desa mempunyai perbedaan misalnya desa-desa di Jawa (Cepogo) dan persentase sumber mata pencaharian rumah tangga sektor nonpertanian hampir mendekati sektor pertanian, yaitu berkisar 43,5 – 48,9 persen. Malahan di Karangwungu sektor nonpertanian lebih dominan (58,3 persen). Hal ini sesuai dengan temuan Adnyana *et al.* (2000) bahwa rumah tangga di Jawa memiliki sumber matapencaharian di sektor nonpertanian yang sudah mencapai 50 persen.

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Matapencaharian di Pedesaan Patanas Menurut Agroekosistem, 2004

Agroekosistem/desa	Sumber matapencaharian (%)	
	Pertanian	Nonpertanian
<b>I. Lahan Sawah</b>	<u>70,8</u>	<u>29,2</u>
1. Sumber Rejo	83,1	16,9
2. Karangwungu	41,7	58,3
3. Passeno	66,2	33,8
4. Selli	90,0	10,0
<b>II. Lahan Kering</b>	<u>74,3</u>	<u>25,7</u>
1. Air Naningan	68,2	31,8
2. Komerling Putih	89,5	10,5
3. Kota Napal	91,7	8,3
4. Cepogo	56,5	43,5
5. Karangtengah	92,5	7,5
6. Mojoagung	51,1	48,9
7. Baroko	68,8	31,2
8. Rumbia	86,6	13,4

## 2. Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan

### 2.1. Struktur Pendapatan dan Pendapatan per Kapita

Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga di pedesaan yaitu dari sektor pertanian dan nonpertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani, usaha peternakan dan berburuh tani. Sedangkan dari nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh nonpertanian dan pekerjaan lainnya di luar pertanian. Struktur pendapatan menurut sektor, tingkat pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di desa-desa berbasis lahan sawah dan lahan kering dapat dilihat pada Tabel 2.

Di desa-desa berbasis lahan sawah, secara agregat struktur pendapatan menunjukkan masih dominannya sektor pertanian (51,89%). Namun demikian bila dilihat antar desa terdapat kisaran yang cukup besar, di Karangwungu pendapatan dari pertanian hanya 26 persen sementara di Passeno mencapai 68 persen. Hal ini karena di Karangwungu penguasaan dan penguasaan lahan sawah relatif sempit (0,15 ha) dan sebagian besar rumah tangga tidak menggarap lahan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lebih bertumpu kepada sektor nonpertanian seperti pedagang kecil, tukang bangunan, profesional, buruh pabrik yang umumnya dilakukan di luar desa (sekitar Klaten dan Solo). Sedangkan di Passeno hampir semua rumah tangga memiliki lahan sawah dengan garapan yang relatif luas (0,95 ha). Selain itu di desa ini sudah

cukup lama berkembang usaha peternakan ayam ras baik skala kecil maupun menengah sehingga sumber pendapatan dari sektor nonpertanian belum terlalu berperan.

Pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar Rp 10,8 juta dengan kisaran Rp 7,6 juta – Rp 17,6 juta/rumah tangga. Memperhatikan variasi pendapatan rumah tangga antar desa nampak bahwa terdapat kecenderungan di desa yang persentase pendapatan dari pertaniannya besar akan menghasilkan total pendapatan rumah tangga yang juga lebih besar. Hal ini semakin memperjelas bahwa sektor pertanian di samping masih dominan sebagai sumber pendapatan, juga mampu memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi rumah tangga dibanding sektor nonpertanian. Jika dihubungkan antara pendapatan rumah tangga dengan jumlah jiwa per rumah tangga, dapat dihitung bahwa pendapatan per kapita di desa-desa berbasis lahan sawah berkisar Rp 1,6 juta – Rp 4,6 juta/kapita/tahun atau rata-rata Rp 2.7 juta/kapita/tahun.

Di desa-desa berbasis lahan kering struktur pendapatan secara agregat juga menunjukkan dominannya sektor pertanian yaitu 54 persen. Variasi sumbangan pendapatan dari sektor pertanian antar desa di lahan kering lebih besar bila dibandingkan dengan desa- desa berbasis lahan sawah, yaitu 17 persen di Mojoagung dan 89 persen di Karangtengah. Rendahnya sumbangan pendapatan dari sektor pertanian di Mojoagung karena sebagian besar rumah tangga tidak memiliki lahan garapan, komoditas yang diusahakan ubikayu dengan harga cenderung rendah dan kesempatan berburuh tani relatif terbatas, sehingga sumber pendapatan lebih bertumpu kepada sektor nonpertanian seperti buruh industri makanan dan nonmakanan, tukang dan pedagang bakulan baik yang dilakukan di sekitar desa maupun ke kota (Pati). Sedangkan di Karangtengah (di Dataran Tinggi Dieng) komoditas yang diusahakan adalah kentang yang diusahakan secara intensif sehingga dapat memberikan kesempatan kerja yang luas. Di Karangtengah sumbangan sektor nonpertanian hanya sekitar 10 persen, diantaranya yang agak menonjol adalah dari usaha perdagangan dan industri makanan ringan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan rumah tangga baik di desa berbasis lahan sawah maupun di desa berbasis lahan kering masih dominan, tetapi nampak di lahan kering lebih besar. Namun demikian ternyata besar pendapatan nominal per rumah tangga dan per kapita di lahan kering lebih rendah. Selain itu di desa-desa berbasis lahan kering tidak terlihat kecenderungan tertentu antara hubungan struktur pendapatan dengan tingkat pendapatan. Hal ini diduga karena bervariasinya

komoditas dominan yang diusahakan di masing-masing desa lahan kering, palawija atau sayuran atau perkebunan yang produksi dan harganya fluktuatif berbeda dengan di desa berbasis lahan sawah yang komoditas dominannya padi yang produksi dan harganya relatif lebih stabil.

Tabel 2. Struktur Pendapatan Berdasarkan Sektor Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Pendapatan per Kapita di Pedesaan Patanas Menurut Agroekosistem, 2004

Agroekosistem/ desa	Sektor (%)			Pendapatan (Rp000)	
	Pertanian	Non-pertanian	Total	Rumah-tangga	Per kapita
<b>I. Lahan Sawah</b>	<u>51,89</u>	<u>48,11</u>	100	<u>10.750,4</u>	<u>2.684,7</u>
1. Sumber Rejo	54,37	45,63	100	10.030,9	2.305,7
2. Karangwungu	25,50	74,50	100	8.868,4	2.449,3
3. Passeno	68,25	31,75	100	17.594,5	4.564,7
4. Selli	49,81	50,19	100	7.645,1	1.615,6
<b>II. Lahan Kering</b>	<u>54,20</u>	<u>45,80</u>	<u>100</u>	9.742,3	<u>2.304,9</u>
1. Air Naningan	26,14	73,86	100	6.756,2	1.321,6
2. Komerling Putih	68,07	31,93	100	5.607,6	1.365,1
3. Kota Napal	86,99	13,01	100	11.596,4	2.603,9
4. Cepogo	40,58	59,42	100	13.038,5	3.238,1
5. Karangtengah	89,23	10,77	100	13.900,4	3.545,5
6. Mojoagung	17,23	82,77	100	8.027,0	2.026,2
7. Baroko	34,50	65,50	100	10.755,0	1.966,9
8. Rumbia	44,26	55,74	100	8.257,5	1.905,9

Hasil penelitian 2004 ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian Adnyana, et al (2000) nampak bahwa peran relatif sektor pertanian dalam struktur pendapatan di desa berbasis lahan sawah mengalami penurunan yakni dari 56,8 persen menjadi 51,8 persen, sementara itu peran sektor nonpertanian meningkat dari 43,2 persen menjadi 48,1 persen. Hal yang sama juga terjadi pada desa-desa berbasis lahan kering, peran sektor pertanian menurun dari 69,2 persen menjadi 54,2 persen, sedangkan sektor nonpertanian meningkat dari 30,8 persen menjadi 45,8 persen. Menurunnya peran relatif sektor pertanian dan meningkatnya peran sektor nonpertanian diduga disebabkan antara lain (1) semakin terbukanya akses perekonomian desa-kota sehingga semakin banyak peluang dan kesempatan kerja di luar pertanian, (2) kecilnya investasi di sektor pertanian sehingga tidak memberikan nilai tambah, (3) perubahan kenaikan upah di sektor nonpertanian lebih besar. Khusus untuk desa-desa berbasis lahan kering turunnya peran relatif sektor pertanian yang cukup tajam antara dua titik waktu seperti tersebut di

atas (2000 dan 2004), diduga disebabkan oleh menurunnya produksi maupun harga komoditas dominan di masing-masing desa selama 2004, seperti terjadi pada komoditas jagung di Rumbia, ubikayu di Komerling Putih, kopi di Air Naningan dan sayuran di Baroko.

## 2.2. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan stratifikasi dari Sajogyo maka dapat dikemukakan bahwa semua desa baik yang berada di agroekosistem lahan sawah maupun lahan kering merupakan desa yang tidak miskin yang berada pada stratifikasi desa cukup dan desa kaya (Tabel 2). Secara agregat desa-desa berbasis lahan sawah termasuk desa kaya sedangkan desa-desa berbasis lahan kering termasuk kriteria desa cukup.

Di desa-desa berbasis lahan sawah, Selli paling rendah stratanya dibandingkan tiga desa lainnya. Hal ini diduga karena produktivitas lahan sawah dan harga gabah di desa ini lebih rendah, dan lahan sawahnya didominasi oleh sawah tadah hujan, sedangkan tiga desa lainnya lahan sawahnya telah mendapat irigasi teknis.

Tabel 3. Tingkat Pendapatan per Kapita Setara Beras dan Dollar Amerika per Tahun di Pedesaan Patanas Menurut Agroekosistem, 2004

Agroekosistem/ desa	Pendapatan per kapita/tahun			US \$/kapita/hari
	Rp	Setara beras (kg)	US \$	
I. Sawah	<u>2.684,7</u>	<u>1.255</u>	<u>316,99</u>	<u>0,87</u>
1. Sumber Rejo	2.305,7	1.143	272,22	0,75
2. Karangwungu	2.449,3	1.113	289,17	0,79
3. Passeno	4.564,7	1.790	538,92	1,48
4. Selli	1.615,6	902	316,99	0,87
II. Lahan Kering	<u>2.304,9</u>	<u>886</u>	<u>272,13</u>	<u>0,75</u>
1. Air Naningan	1.321,6	543	156,03	0,43
2. Komerling Putih	1.365,1	689	163,53	0,45
3. Kota Napal	2.603,9	814	307,43	0,84
4. Cepogo	3.238,1	1.117	382,30	1,05
5. Karangtengah	3.545,5	1.144	418,60	1,45
6. Mojoagung	2.026,2	837	239,22	0,66
7. Baroko	1.966,9	803	232,22	0,64
8. Rumbia	1.905,9	952	225,02	0,62

1 US \$ = Rp 8.470,-

Harga beras : berdasarkan tingkat harga di lokasi penelitian, rata-rata Rp 2.448/kg

1. paling miskin : < 240 kg beras/kapita/tahun
2. miskin sekali : 240 – 360 kg beras/kapita/tahun
3. miskin : 360 – 480 kg beras/kapita/tahun
4. cukup : 480 – 960 kg beras/kapita/tahun
5. kaya : > 960 kg beras/kapita/tahun

Hasil penelitian 2004 ini bila dibandingkan dengan hasil penelitian Adnyana, et al (2000) nampak bahwa peran relatif sektor pertanian dalam struktur pendapatan di desa berbasis lahan sawah mengalami penurunan yakni dari 56,8 persen menjadi 51,8 persen, sementara itu peran sektor nonpertanian meningkat dari 43,2 persen menjadi 48,1 persen. Hal yang sama juga terjadi pada desa-desa berbasis lahan kering, peran sektor pertanian menurun dari 69,2 persen menjadi 54,2 persen, sedangkan sektor nonpertanian meningkat dari 30,8 persen menjadi 45,8 persen. Menurunnya peran relatif sektor pertanian dan meningkatnya peran sektor nonpertanian diduga disebabkan antara lain (1) semakin terbukanya akses perekonomian desa-kota sehingga semakin banyak peluang dan kesempatan kerja di luar pertanian, (2) kecilnya investasi di sektor pertanian sehingga tidak memberikan nilai tambah, (3) perubahan kenaikan upah di sektor nonpertanian lebih besar. Khusus untuk desa-desa berbasis lahan kering turunnya peran relatif sektor pertanian yang cukup tajam antara dua titik waktu seperti tersebut di atas (2000 dan 2004), diduga disebabkan oleh menurunnya produksi maupun harga komoditas dominan di masing-masing desa selama 2004, seperti terjadi pada komoditas jagung di Rumbia, ubikayu di Komerling Putih, kopi di Air Naningan dan sayuran di Baroko.

Bila mengacu kepada kriteria Bank Dunia yang mengukur kemiskinan dengan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan US \$ 1,0/kapita/hari maka secara agregat desa-desa pada kedua agroekosistem tersebut termasuk ke dalam desa yang masih miskin. Namun terlihat desa-desa berbasis lahan sawah lebih tinggi pendapatannya dibandingkan desa-desa berbasis lahan kering. Desa yang tidak termasuk kriteria miskin di agroekosistem lahan sawah adalah Passeno (Sidrap di Sulawesi Selatan) yang merupakan daerah persawahan maju dengan irigasi teknis. Sedangkan di agroekosistem lahan kering yang tidak termasuk desa miskin adalah Karangtengah (Banjarnegara di Jawa Tengah) yang merupakan daerah kembang Dataran Tinggi Dieng dengan pengusaha yang intensif.

Dengan menggunakan kriteria garis kemiskinan dari BPS yang mengacu kepada besarnya pengeluaran/konsumsi per kapita per bulan pada tahun 2003 sebesar Rp 105.888 per bulan (untuk pedesaan), maka desa-desa di kedua agroekosistem tersebut tidak termasuk ke dalam kriteria desa miskin, karena pengeluaran per kapita per bulan di masing-masing agroekosistem adalah Rp 142.433 dan Rp 148.618 lebih tinggi dibandingkan dengan Rp 105.888 (Tabel 4). Dengan demikian pengukuran tingkat

kemiskinan menggunakan kriteria BPS memberikan hasil yang relatif sama dengan yang digunakan kriteria Sajogyo. Hal ini antara lain karena tingkat pengeluaran per kapita (pangan dan nonpangan) berbanding lurus dengan tingkat pendapatan per kapita.

Tabel 4. Rata-rata Pengeluaran (Pangan dan Non Pangan) Rumah Tangga dan Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga per Kapita di Pedesaan Patanas, Menurut Agroekosistem, 2004

Agroekosistem	Pengeluaran (Rp)			Rp/kapita/	
	Pangan	Nonpangan	Jumlah	Tahun	Bulan
Lahan Sawah	3.629.915 (48,27%)	3.890.540 (51,73%)	7.520.455 (100%)	1.709.195	142.433*
Lahan Kering	4.199.785 (51,19%)	4.003.958 (48,81%)	8.203.743 (100%)	1.783.420	148.618*

\* di atas garis kemiskinan

### 2.3. Distribusi Pendapatan

Persoalan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena dapat dijadikan indikator berhasil/tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah/negara. Dalam penelitian ini ada dua cara yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu dengan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia.

Dengan ukuran Indeks Gini menunjukkan bahwa di desa-desa berbasis lahan sawah distribusi pendapatan rumah tangga termasuk ke dalam tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi (Indeks Gini 0,522 dengan kisaran 0,447 – 0,533). Keadaan serupa juga terlihat di desa-desa berbasis lahan kering (Indeks Gini 0,501 dengan kisaran 0,378 – 0,573). Di desa-desa berbasis lahan sawah persentase desa dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan tinggi sama besarnya dengan persentase desa dengan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan sedang. Sedangkan di desa-desa berbasis lahan kering persentase desa dengan ketimpangan distribusi pendapatan tinggi sebesar 25 persen dan ketimpangan distribusi pendapatan sedang sebesar 75 persen. Berdasarkan hal tersebut maka secara agregat ketimpangan distribusi pendapatan di kedua agroekosistem relatif sama, meskipun terdapat kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan di des-desa berbasis lahan kering lebih rendah.

Tabel 5. Distribusi Pendapatan Berdasarkan Indeks Gini dan Kriteria Bank Dunia di Pedesaan Patanas Menurut Agroekosistem, 2004

Agroekosistem/ desa	Distribusi berdasarkan			
	Indeks Gini	Kelompok 40% terendah	Kelompok 40 % kedua	Kelompok 20% tertinggi
I. Sawah	<u>0,522*</u>	<u>11,73*</u>	<u>44,28</u>	
1. Sumber Rejo	0,523*	10,40*	42,84	43,99
2. Karangwungu	0,488	11,40	42,75	46,85
3. Passeno	0,447*	15,43*	54,32	30,25
4. Selli	0,533*	9,69*	48,30	42,01
II. Lahan Kering	<u>0,501</u>	<u>12,63</u>	<u>50,98</u>	<u>36,69</u>
1. Air Nanningan	0,573*	8,42*	47,76	43,82
2. Komering Putih	0,398*	15,76*	57,30	26,94
3. Kota Napal	0,434*	14,97*	54,20	30,83
4. Cepogo	0,479	11,30	48,08	40,62
5. Karangtengah	0,497*	12,39*	45,34	42,27
6. Mojoagung	0,503*	11,67*	45,32	43,01
7. Baroko	0,479	11,44	58,45	30,11
8. Rumbia	0,425*	15,08*	51,65	33,27

Keterangan: \* terdapat kesesuaian kriteria/kategori

Hasil analisis berdasarkan kriteria Bank Dunia menunjukkan distribusi pendapatan rumah tangga di desa-desa berbasis lahan sawah berada pada tingkat distribusi pendapatan dengan ketimpangan tinggi, karena kelompok 40 persen berpendapatan rendah mendapatkan porsi di bawah 12 persen (11,73%). Sedangkan distribusi pendapatan rumah tangga di desa-desa berbasis lahan kering berada pada tingkat ketimpangan sedang, karena kelompok 40 persen berpendapatan terendah mendapat porsi pada kisaran 12 – 17 persen (12,63%). Dilihat dari persentase desa, ada 75 persen desa berbasis lahan sawah mempunyai distribusi pendapatan dengan ketimpangan tinggi, sedangkan di desa berbasis lahan kering 50 persen. Namun bila dilihat dari besarnya perbedaan persentase yang relatif kecil, maka ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga antara desa-desa berbasis lahan sawah dan lahan kering relatif tidak terdapat perbedaan yang mencolok. Dilihat dari 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi, maka secara agregat desa-desa berbasis lahan sawah menguasai 43,99 persen, padahal di desa-desa berbasis lahan kering kelompok ini hanya menguasai 36,39 persen.

Dengan melihat porsi 40 persen rumah tangga dengan pendapatan terendah dan 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi maka secara agregat ketimpangan distribusi pendapatan di desa-desa berbasis lahan kering lebih rendah. Dengan kata lain distribusi pendapatan di desa-desa berbasis lahan kering lebih baik.

Hasil pengukuran distribusi pendapatan dengan menggunakan Indeks Gini menunjukkan bahwa sebagian besar (75,0%) dapat diperjelas oleh pengukuran dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, sehingga pengukuran distribusi pendapatan menggunakan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia memperlihatkan kesesuaian. Dengan kata lain hasil analisis dengan menggunakan kriteria Bank Dunia mendukung hasil yang ditarik dari besaran Indeks Gini yaitu distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan dapat digolongkan ke dalam kriteria ketimpangan antara sedang dan tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan Patanas dalam dasawarsa terakhir belum menunjukkan kemajuan yang berarti dan malahan cenderung meningkat. Hasil analisis Patanas 1995 dan 1999 (Adnyana et.al, 2000) menunjukkan Indeks Gini pendapatan rumah tangga untuk desa-desa berbasis lahan sawah masing-masing sebesar 0,498 dan 0,513. Sedangkan Indeks Gini untuk desa-desa berbasis lahan kering (tidak termasuk komoditas perkebunan) sebesar 0,483 dan 512 dan bila termasuk komoditas perkebunan sebesar 0,478 dan 0,499.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara agregat struktur pendapatan rumah tangga pedesaan masih didominasi sektor pertanian. Namun terdapat kecenderungan adanya pergeseran dengan semakin meningkatnya peranan sektor nonpertanian dalam kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan. Hal ini terkait erat karena pendapatan dari sektor pertanian tidak bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Tingkat pendapatan per kapita di desa-desa beragroekosistem lahan sawah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di desa-desa beragroekosistem lahan kering. Seiring dengan hal tersebut kontribusi pendapatan yang berasal dari sektor pertanian di desa-desa beragroekosistem lahan kering lebih tinggi dibandingkan dengan di desa-desa

beragroekosistem lahan sawah. Ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pertanian yang diperoleh rumah tangga relatif lebih rendah dibandingkan sektor nonpertanian.

Tingkat kemiskinan rumah tangga yang mengacu kriteria yang digunakan Sajogyo dan BPS menunjukkan bahwa secara agregat desa-desa pada kedua agroekosistem termasuk ke dalam desa-desa yang tidak miskin. Desa-desa beragroekosistem lahan sawah termasuk kriteria kaya sedangkan desa-desa beragroekosistem lahan kering termasuk kriteria cukup. Namun bila mengacu pada kriteria Bank Dunia maka secara agregat desa-desa di kedua agroekosistem tersebut termasuk ke dalam kriteria miskin. Desa di agroekosistem lahan sawah yang tidak termasuk miskin adalah Passeno (Sulawesi Selatan) yang berbasis lahan sawah irigasi teknis, sedangkan pada agroekosistem lahan kering adalah Karangtengah (Jawa Tengah) yang berbasis tegalan dengan usahatani kentang. Di kedua desa tersebut kegiatan usahatani telah dilakukan dengan intensif.

Distribusi pendapatan rumah tangga pedesaan di kedua agroekosistem termasuk ke dalam kriteria dengan ketimpangan yang tinggi. Dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya maka perkembangan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di pedesaan dalam dasa warsa terakhir belum menunjukkan kemajuan dan malahan cenderung semakin timpang.

Aspek distribusi pendapatan menjadi semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan secara implisit, langsung maupun tidak langsung terkait dengan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan rumah tangga pedesaan termasuk ke dalam ketimpangan pendapatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan masih perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan maka upaya memperluas dan pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat tani di pedesaan perlu lebih dikembangkan ke arah berusaha sendiri (*self employment*) dan bukan hanya mengandalkan pada kegiatan jasa yang memperoleh upah (*wage employment*).

## **Saran**

Untuk hal tersebut, maka program-program pemerintah yang berkaitan dengan aspek peningkatan dan pemerataan pendapatan rumah tangga pedesaan hendaknya

memperhatikan aksesibilitas terhadap modal dan keterampilan, seperti program kredit yang dirancang khusus untuk suatu kelompok sasaran tertentu, yaitu rumah tangga berpendapatan rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O, Sumaryanto, M. Rachmat, R. Kustiari, SH. Susilowati, E. Suryani and Suprpto. 2000. *Assesing the Rural Development Impact of the Crisis in Indonesia*. CASER, Bogor, Indonesia and The World Bank, Washington D.C.
- Bank Indonesia. 2004. *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Indonesian Financial Statistics. April 2004.
- BPS 2003. *Statistik Indonesia*. Kemiskinan Jakarta – Indonesia. Hal. 575-589.
- Crescent, 2002. *Pengembangan Model Keterjaminan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah*. Bogor.
- Darwis. V dan A. R. Nurmanaf. 2001. *Pengentasan Kemiskinan Upaya yang Telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang*. FAE. Vol. 9 No. 1 Juli 2001. Puslitbang Sosek Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Hal. 55 – 67.
- Fadjri, P.A. 2002. *Pemikiran Dasar Pengentasan Kemiskinan dalam Era Otonomi Daerah*. *Warta Demografi* No. 1. Th. 32, 2002. Lembaga Demografi FEUI. Jakarta. Hal. 30 – 35.
- Oshima, Harry T. 1976. *Distribusi Pendapatan*. *Prisma* No. 1, Februari 1976. Hal.3-12.
- Rasahan, C.A. dan M. Syukur. 1989. *Kontribusi Sektor Pertanian Menuju Struktur Pendapatan Berimbang di Pedesaan*. Dalam: *Prosiding Perkembangan Struktur Produksi, Ketenagakerjaan dan Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan*. Effendi Pasandaran et.al (Eds). *Puslit Agro Ekonomi*. Badan Litbang Pertanian. Hal. 229-237.
- Sajogyo. 1978. *Golongan Miskin di Pedesaan*. Dalam: *Kemiskinan Di Tengah Deru Pembangunan*. PUSTAKA No.2 Th. II Edisi Maret 1978. Bandung. Hal. 8-13.
- Sarasutha, IGP dan M.N. Noor. 1994. *Alternatif Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Agroekosistem di Kawasan Timur Indonesia*. Suatu Tinjauan Hasil Penelitian. Dalam: *Kinerja Penelitian Tanaman Pangan*. Buku 6. *Sistem Usahatani dan Komponen Penunjang*. M. Syam, et.al (Eds). *Puslitbangtan*. Badan Litbang Pertanian. Hal 1811-1812.
- Suhardjo, A.J. 1997. *Stratifikasi Kemiskinan dan Disribusi Pendapatan di Wilayah Pedesaan (Kasus Tiga Dusun Wilayah Karang Selatan, Gunung Merapi, Jawa Tengah*. *Majalah Geografi Indonesia* No. 19 Th. 11, Maret 1997, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hal. 69-86.
- Syafaat, N., S. Mardianto dan P. Simatupang. 2003. *Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani*. Dalam: *Analisis Kebijakan Pertanian (Agricultural Policy Analysis)*. Vol.1 No. 1 Maret 2003. Puslitbang Sosek Pertanian, Bogor. Hal. 67-78.
- Syukur, M, HPS. Rachman dan S.M. Pasaribu. 1988. *Pola dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan*. Dalam: *Prosiding Patanas Perubahan Ekonomi*

Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. F. Kasryno, et.al (Eds). Puslit Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian. Hal. 299-313.

Szal, R. and S. Robinson. 1977. Measuring Income Inequality. Dalam: C.R. Frank and R.C. Webb (Eds). Income Distribution and Growth in Less Developed Countries. The Brookings Institution. Pg. 491 – 533.

